

Penerapan *Securitization of Immigration* dalam Kebijakan Imigrasi Amerika

Serikat Tahun 2017-2020

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

TITANSYAH

15323090

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

(2021)

Penerapan *Securitization of Immigration* dalam Kebijakan Imigrasi Amerika

Serikat Tahun 2017-2020

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

TITANSYAH

15323090

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

(2021)

HALAMAN PENGESAHAN
Penerapan *Securitization of Immigration* dalam Kebijakan Imigrasi
Amerika Serikat Tahun 2017-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

22 Juli 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

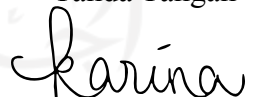




Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

25 Juli 2021



TITANSYAH

Tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	6
DAFTAR SINGKATAN	7
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang Masalah.....	8
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Cakupan Penelitian.....	12
1.5 Signifikansi Penelitian.....	13
1.6 Tinjauan Pustaka.....	14
1.7 Landasan Konseptual.....	18
1.8. Metode Penelitian.....	21
BAB II	24
DINAMIKA KEIMIGRASIAN DAN KEBIJAKAN IMIGRASI DI AMERIKA SERIKAT	24
2.1 Evolusi Kebijakan dan Keimigrasian Amerika Serikat.....	24
BAB III	35
THE SECURITIZATION OF MIGRATION DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN AMERIKA SERIKAT	35
3.1. Institutional Category dalam Green Card Lottery sebagai Upaya Sekuritisasi Imigrasi Amerika Serikat.....	35
3.1.1 Legal Indicator.....	36
3.1.2 Policy Statements Indicator.....	38
3.1.3 Saliency Indicator.....	40
3.2 <i>Security Practice Category</i> dalam Praktik Sekuritisasi Imigrasi.....	42
3.2.1 <i>Interdiction Indicator</i>	42
3.2.2 Detention Indicator.....	44
BAB IV	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Rekomendasi.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Grafik 1	26
Tabel 1	49



DAFTAR SINGKATAN

ACA : Asylum Cooperation Agreement
AS : Amerika Serikat
BDSP : Biometric Data Sharing Program
CBP : Custom Border Protection
DAPA : Deferred Action for Parents of Americans
DHS : Department of Homeland Security
DREAM : Development, Relief and Education for Alien Minors
DV : Diversity Visa
ICE : Immigration and Customs Enforcement
INA : The Immigration and Nationality Act
LPR : Lawful Permanent Residents
USC : United States Code
USCIS : United States Citizenship and Immigration Services
UU : Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat mulai membuat kebijakan keimigrasian setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya. Kebijakan keimigrasian saat itu mencerminkan politik dan menetapkan batasan jumlah imigran. Namun, undang-undang tahun 1965 memberlakukan kebijakan *Open Door* kepada para imigran yang datang dari luar Amerika Serikat (Cohn, 2015). Para imigran yang datang kemudian dapat memilih untuk menetap dan tinggal menjadi warga negara Amerika Serikat, akan tetapi oleh pemerintah Amerika Serikat meminta kepada para imigran yang datang untuk tidak meninggalkan kebudayaannya dan tetap mempraktikkannya selama menetap di Amerika Serikat.

Terdapat beberapa cara bagi imigran untuk memasuki Amerika Serikat, diantaranya; (1) mendapatkan visa, yang terbagi atas beberapa jenis seperti; visa imigran, visa turis, *fiancé visa* (untuk orang asing yang memiliki tunangan atau akan menikah dengan orang Amerika Serikat), visa pelajar, visa bisnis dan visa transit; (2) pengungsi; dan (3) pencari suaka (USA GOV, 2021). Sementara itu, untuk dapat menjadi penduduk tetap Amerika Serikat atau yang disebut dengan *Lawfull Permanent Residents* (LPRs), imigran harus memperoleh *green card* yang didapatkan dengan berbagai cara, namun kebanyakan imigran disponsori oleh anggota keluarga atau majikan tempat imigran bekerja di Amerika Serikat. Imigran juga dapat memperoleh *green card* melalui status pengungsi, pencari suaka atau program kemanusiaan lainnya (Department of Homeland Security, 2021).

Dalam UU imigrasi, penerima *green card* didefinisikan sebagai, “*the status of having been lawfully accorded the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with the immigration laws, such status not having changed*”, yang berarti penerima *green card* dapat tinggal dan bekerja secara permanen di mana saja di AS, memiliki properti, bersekolah di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Mereka juga dapat bergabung dengan angkatan bersenjata dan melamar menjadi warga negara AS jika mereka memenuhi persyaratan kelayakan tambahan tertentu.

Dengan memperoleh status LPRs, maka imigran akan diperbolehkan untuk tinggal dan hidup bahkan bekerja secara komersial di Amerika Serikat. Status imigran tersebut masih menjadi warga negara asalnya, akan tetapi dapat tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Beda halnya jika mereka memutuskan untuk pindah kewarganegaraan, status negara asalnya akan hilang dan akan berganti dengan status kenegaraan Amerika Serikat yang tentunya harus melalui beberapa tahapan. Setidaknya butuh waktu sekitar 7 tahun untuk dapat merubah status kenegaraannya, apabila mereka sudah bekerja dan tinggal selama 7 tahun di Amerika Serikat, mereka bisa mengurus apabila mereka ingin menjadi warga negara Amerika Serikat secara permanen (Morse, 2018).

Banyaknya imigran yang masuk dengan latar belakang kebudayaan yang berda-beda membuat Amerika Serikat menjadi negara multikultural. Budaya Amerika Serikat telah berkembang ke seluruh dunia dalam berbagai bentuk adaptasi dan juga sudah memiliki pengaruh yang besar bagi dunia. Amerika Serikat juga salah satu negara yang menjadi pusat pendidikan dengan kualitas yang tinggi. Negara tersebut memiliki lebih dari 1.500 universitas serta institusi Pendidikan

yang beberapa diantaranya sangat terkenal (Hay, 1899), sehingga banyak warga Negara lain dari luar Amerika Serikat yang ingin datang ke Negara tersebut baik untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan (Mcnaill, 2019).

Dengan adanya imigran dan laju pergerakan imigran yang masuk ke AS, tentunya memberikan dampak negatif dan positif. Untuk dapat meminimalisir kemungkinan dampak negatif, dengan mengacu pada UU Keamanan Dalam Negeri tahun 2002, AS membentuk *Department of Homeland Security* (DHS) yaitu departemen eksekutif federal AS yang bertanggung jawab atas keamanan publik, yang sebanding dengan Kementerian Dalam Negeri. Misinya meliputi anti-terorisme, keamanan perbatasan, imigrasi dan bea cukai, keamanan dunia maya, serta pencegahan dan pengelolaan bencana. DHS mulai beroperasi pada tahun 2003, dibentuk sebagai hasil dari Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, yang diberlakukan tahun sebelumnya sebagai tanggapan atas serangan 9/11 (Zappile, 2014).

Dalam pelaksanaannya DHS terbagi atas tiga fungsi yaitu, *U.S. Citizenship and Immigration Services* (USCIS) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan imigrasi dan adjudikasi naturalisasi dan layanan terkait lainnya, *U.S. Immigration and Customs Enforcement* (ICE) yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum imigrasi secara internal atau dalam wilayah AS, and *U.S. Customs and Border Protection* (CBP) yang bertanggung jawab dalam mengamankan perbatasan AS dengan pintu masuk perbatasan lainnya. Secara sederhana, DHS merupakan lembaga yang dapat mengeluarkan dan memasukkan imigran dari dan ke AS.

Sementara itu, terdapat hukum yang mengatur kebijakan imigrasi AS saat ini disebut *The Immigration and Nationality Act* (INA) yang diundangkan pada tahun

1952. INA tertuang dalam *United States Code (USC)* yang merupakan kumpulan dari semua hukum AS. INA memuat banyak peraturan dan menata ulang struktur undang-undang keimigrasian. INA juga telah mengalami amandemen berkali-kali selama bertahun-tahun dan memuat banyak ketentuan terpenting dari undang-undang keimigrasian (US Citizenship and Immigration Services, 2019).

Namun, banyaknya imigran yang memasuki Amerika Serikat juga menimbulkan problema bagi Negara itu sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andrew Forrester, Michelangelo Landgrave, dan Alex Nowrasteh menunjukkan bahwa tahun 2018, tingkat kriminalitas imigran ilegal adalah 782 per 100.000 imigran ilegal, 535 per 100.000 imigran legal, dan 1.422 per 100.000 penduduk asli Amerika di Texas. Namun, penduduk asli Amerika yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi diikuti oleh imigran ilegal dan kemudian dengan imigran legal memiliki tingkat terendah untuk semua jenis kejahatan khusus lainnya seperti kejahatan kekerasan, kejahatan properti, pembunuhan, dan kejahatan seks (Forrester, Landgrave, & Nowrasteh, 2020). Meskipun penelitian lain menunjukkan bahwa angka kriminalitas imigran lebih rendah apabila dibandingkan dengan penduduk asli Amerika Serikat, bagi Trump hal tersebut dapat membahayakan keselamatan warga Amerika Serikat.

Sehingga, semenjak pemerintahan Donald Trump, para imigran yang ingin masuk ke Amerika Serikat mendapatkan hambatan yang cukup besar. Begitu juga untuk mendapatkan status LPRs yang berawal pada tahun 2017, pada saat itu presiden Donald Trump mengeluarkan perintah mengenai kebijakan untuk menjaga wilayah perbatasan agar tidak adanya imigran ilegal yang masuk ke wilayah Amerika Serikat. Donald Trump juga menuntut para imigran ilegal serta

melakukan penahanan terhadap imigran tersebut, dan juga memisahkan para imigran tersebut dari keluarganya. Selain itu, dalam upayanya untuk mengamankan Amerika Serikat, Trump mengeluarkan beberapa *executive orders* terkait kebijakan imigrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka akan ditarik suatu rumusan masalah yaitu, “Bagaimana penerapan *securitization of migration* dalam kebijakan imigrasi pada masa pemerintahan Donald Trump tahun 2017-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan dinamika perubahan kebijakan keimigrasian Amerika Serikat dalam upaya *securitization of migration* pada masa pemerintahan Donald Trump tahun 2017-2020.

1.4 Cakupan Penelitian

Fokus penelitian dalam ini adalah mencakup beberapa perubahan yang terjadi dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat, kemudian dampaknya terhadap keamanan negara Amerika Serikat dalam hal keimigrasian yang akan ditinjau melalui konsep sekuritisasi hubungan internasional. Penulis juga membatasi penelitian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang merupakan waktu di mana terjadi banyak perubahan mengenai kebijakan keimigrasian Amerika Serikat.

1.5 Signifikansi Penelitian

Semenjak kepemimpinan Presiden Donald Trump, terdapat banyak kebijakan yang mengalami perubahan salah satunya kebijakan terkait keimigrasian atau imigran. Setidaknya terjadi 3 kali perubahan kebijakan yang cukup signifikan terhadap imigran asing yang dikeluarkan oleh Donald Trump, yakni pada tahun 2017, 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2017, Donald Trump mengeluarkan perintah mengenai penegakan keamanan perbatasan, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk mengajukan penuntutan kepada imigran ilegal, penahanan yang sewenang-wenang dan juga memisahkan keluarga yang berada di perbatasan. Perintah ini juga bertujuan untuk mengembalikan para imigran ke negara asal mereka tanpa mendaftarkan status kewarganegaraan mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan yang diterbitkan pada tahun 1967 tentang status pengungsi yang mana, para imigran tidak dapat dihukum apabila memasuki suatu negara secara ilegal. Kemudian pada tahun 2019, Donald Trump juga mengeluarkan perintah tentang larangan suaka yang mana semua imigran yang masuk, berupaya masuk ke Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada maka mereka tidak bisa mengajukan permohonan perlindungan dari negara tujuan mereka. Hal ini juga bertentangan dengan undang-undang yang disahkan oleh kongres Amerika Serikat yang mana isi undang-undang itu adalah melindungi hak-hak semua orang yang datang ke Amerika Serikat. Selanjutnya pada Tahun 2020, sekali lagi Donald Trump telah menandatangani kebijakan terkait suspensi program kartu hijau serta melarang keimigrasian Amerika Serikat untuk mengeluarkan izin tinggal bagi para imigran. Hal tersebut menjadi penting untuk diketahui karena negara seperti Amerika Serikat saja telah memperlihatkan adanya

kekhawatiran terhadap imigran yang keluar masuk ke negaranya dan melakukan upaya sekuritisasi imigrasi dengan melakukan perubahan pada beberapa kebijakan keimigrasian.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang ditulis oleh Logan dan Thomas yang berjudul *The U.S Diversity Visa Programme and the Transfer of Skills from Africa* menuliskan bahwa Program Diversity Visa (DV) atau Keragaman Visa dirancang untuk meningkatkan komposisi multikultural dari 'melting pot' AS di luar negara sumber tradisional di Eropa. Untuk mencapai tujuan program ini, persyaratan mendasar untuk berpartisipasi dalam program ini adalah memiliki ijazah SMA. Terlepas dari tujuan dan desainnya yang bermanfaat, implikasi program ini untuk orang Afrika yang kemampuannya rendah tidaklah mudah. "Massa yang berkerumun, miskin dan lelah" dari Afrika didefinisikan sebagai bagian yang ketat, dan hambatan yang mereka hadapi lebih berat secara ekonomi dan administratif dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berasal dari Eropa. Biaya untuk mengubah kemenangan lotre menjadi keragaman visa dan green card sebenarnya sangat mahal sehingga hanya orang Afrika dengan kemampuan ekonomi tinggi dan profesional dibandingkan dengan lulusan SMA yang bisa mampu membayar biaya partisipasi program ini. Dengan demikian, mekanisme program ini dibuat untuk mereka yang memiliki keterampilan tertentu. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menguji sejauh mana DV telah memfasilitasi pergerakan pekerja profesional, teknis dan sejenis (PTK) dari Afrika ke Amerika Serikat, dan beberapa implikasi ekonomi dan kebijakan dari proses tersebut. (Logan and Thomas, 2012, pp. 1-3)

Dalam jurnal yang ditulis oleh Anna O. Law yang berjudul *The Diversity Visa Lottery A Cycle of Unintended Consequences in United States Immigration Policy* menuliskan bahwa Setiap tahun sejak 1988, pemerintah federal Amerika Serikat menyelenggarakan lotere, bukan lotre yang berhadiah uang, melainkan lotre yang memberikan 50.000 visa nasional kepada negara - negara tertentu yang termasuk dalam daftar "kurang terwakilkan' di sistem legal imigrasi. Pemenang yang beruntung pada lotere visa berhak mendapatkan visa untuk memasuki Amerika Serikat, status tempat tinggal tetap yang legal (green-card), dan penerima yang berkualifikasi untuk naturalisasi. Berbagai pengamat imigrasi dan sejenisnya di publik mungkin pernah mendengar tentang ketentuan keci dan tidak jelas ini. Hal yang tidak diketahui adalah asal dari ketentuan ini termasuk dorongan pembuatannya, dan sejauh mana program ini menyimpang dari tujuan awalnya. Bagaimana program yang tidak biasa ini menentang filosofi dari penerimaan imigrasi Amerika Serikat yang awalnya hanya sementara kemudian menjadi hal yang permanen dari undang - undang Imigrasi dan Nasionalisasi?

Artikel ini berargumen bahwa terbentuknya keberagaman lotere yang ada sekarang berbeda jauh dengan asalnya yaitu pola imigrasi yang dibentuk dari undang-undang imigrasi pada tahun 1965. Ide dari keberagaman lotere ini sebenarnya berasal lebih lama jauh sebelum tahun 1980 an ketika program ini berhasil melewati tahap legislatifnya. Artikel ini juga berargumen lebih jauh tentang bagaimana hal-hal yang tidak terduga dari UU tahun 1965 mendasari terbentuknya keberagaman lotere, kebijakan yang terbentuk karena konsekuensi tidak sengaja dari suatu kalangan. Bersumber dari laporan kongres, dokumen pemerintah, serta interview personal dari kalangan yang terlibat dengan pembuatan

dan implementasi dari keberagaman lotere, artikel ini melacak pembuatan dan evolusi dari lotere dan peran dari kongres yang membuat kebijakan untuk keuntungan dari etnis konstitusi serta praktisi politik. (Anna O. Law, 2002, pp. 1-3)

Dalam artikel yang ditulis oleh the London News Journal yang berjudul The 2020 Green Card Lottery is Open for submission from the 7th of October 2020 menuliskan bahwa Sejak 1998, kantor green card Amerika Serikat menyediakan servis bernilai lebih untuk keragaman visa lebih dari 2 juta pelamar dari seluruh dunia. Mereka baru - baru ini mengumumkan batas waktu mereka untuk lotre Diversity Visa-2022 Green card pada Selasa 10 November 2020. Mereka menyarankan kepada seluruh pelamar untuk menyerahkan data mereka secepat mungkin. Peralnya ketika menyerahkan data pada minggu terakhir akan menyebabkan penumpukan dan membuat masalah pada sistem website. Sangat disayangkan lebih dari 65% dari 20 juta orang yang melamar tidak diterima karena error. Alasan utamanya adalah penggunaan software gratis yang digunakan saat melamar. Oleh karena itu, lebih dari 5 juta pelamar dari seluruh dunia memilih untuk membayar biaya dan membiarkan Kantor Green card Amerika Serikat untuk membantu mereka melamar. Membayar 80\$ untuk satu orang atau 120\$ untuk keluarga merupakan biaya yang kecil untuk memastikan bahwa data mereka diterima langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Para pelamar disarankan untuk membaca pedoman keragaman lotere sebelum memutuskan layanan mana yg harus dipilih oleh para pelamar. Kantor Green card Amerika Serikat yang didirikan tahun 1998 membuat korporasi legal yang terdaftar dalam kantor imigrasi yang menyediakan layanan solusi imigrasi yang bergaransi bebas error untuk aplikasi

program visa. Jutaan pelamar yang menggunakan layanan ini dan sekarang tinggal sesuai mimpi mereka di Amerika Serikat. (The London News Journal, 2020)

Dalam jurnal yang ditulis oleh Veronica Richard yang berjudul *Lived experienced of diversity visa lottery immigrants in the United States* menuliskan bahwa Setiap tahunnya, kurang lebih 50 ribu orang imigrasi ke AS melalui jalur yg disebut *lotre Diversity Visa (DV)*. Pada artikel ini, penulis menjabarkan review literatur dari imigrasi AS melalui DV, bagaimana hal ini merepresentasikan sejarah imigrasi mereka dan menggunakan fenomenologi untuk menginvestigasi dan mengetahui perasaan dari imigran, ekspektasi, dan pengalaman mereka sebagai penerima DV. Hal yang dialami para imigran ini adalah perasaan yg campur aduk dikarenakan ekspektasi tinggi sebelum menerima DV dan masalah baru yang dialami pasca imigrasi ke AS. Hasil dari penelitian ini termasuk pengalaman hidup saat di AS, akses untuk belajar dan kesempatan untuk pelatihan, dan juga rekomendasi untuk mendukung para penerima DV selanjutnya. (Richard, 2012)

Penjelasan di atas telah disampaikan mengenai beberapa tulisan terkait kasus migrasi dan beberapa aturan-aturan terkait keimigrasian yang berlaku di Amerika Serikat. Berbeda dengan tulisan-tulisan yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka di atas, analisis dalam penelitian ini akan melengkapi penelitian dan tulisan sebelumnya yang belum membahas mengenai Bagaimana perubahan kebijakan *Green Card* sebagai bentuk upaya sekuritisasi pemerintah Amerika Serikat terhadap imigran tahun 2017-2020. Dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka konseptual *The Securitization of Migration*. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada analisis upaya sekuritisasi Amerika Serikat terhadap imigran yang

masuk ke negara nya khususnya dalam kebijakan *Green Card Lottery* serta bagaimana efektifitas kebijakan tersebut.

1.7 Landasan Konseptual

The Securitization of Migration

Landasan konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *The Securitization of Migration* yang ditulis oleh Philippe Bourbeau. Philippe Bourbeau dalam bukunya menjelaskan bahwa sekuritisasi migrasi merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang gambaran pergerakan seseorang yang melewati batas suatu negara dan juga merupakan sebuah sistem tatanan yang akan mendasari setiap pergerakan orang tersebut. Kemudian Bourbeau membagi teori Sekuritisasi tersebut menjadi dua kategori yakni *Institutional Category* dan *Security Practice Category* yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi tiga dan dua indikator lain (Bourbeau, 2011).

Dalam *Institutional Category*, Bourbeau menjelaskan bahwa konstitusi adalah seperangkat indikator yang menawarkan sekuritisasi migrasi secara berpasangan yang dilakukan dengan cara menghubungkan antara satu hal dengan hal lainnya yang memiliki kesamaan pada institusi pemerintahan. Kemudian kategori ini dikelompokkan kedalam tiga indikator antara lain hukum sebagai indikator (*Legal Indicator*), kebijakan pemerintah sebagai indikator (*Policy Statement Indicator*) serta *Saliency Indicator* (Bourbeau, 2011).

A. *Legal Indicator*, merupakan salah satu indikator yang penting dalam kategori institusional mengingat bahwa hukum memiliki peranan yang penting dalam proses sekuritisasi migrasi. Terkait hal migrasi, setiap negara

tentunya memiliki aturan hukumnya masing-masing yang meliputi tujuan, prosedur migrasi seorang imigran serta upaya dalam menangani ancaman yang mungkin saja ditimbulkan oleh para imigran yang masuk ke negaranya.

B. *Policy Statement Indicator*, indikator ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terkait proses migrasi yang biasanya akan menimbulkan permasalahan keamanan bagi negara tersebut sehingga dapat menjadi ancaman seperti migrasi ilegal serta terorisme transnasional.

C. *Saliency Indicator*, berkaitan antara migrasi dan keamanan serta seberapa kuat hubungan antara kedua hal tersebut. *Saliency* yang dimaksud ialah seberapa kuat hubungan antara migrasi dan keamanan di dalam kebijakan suatu negara, misalnya ketika permasalahan terkait migrasi menjadi masalah prioritas dalam kebijakan (Bourbeau, 2011).

Kemudian dalam *Security Practice Category* dijelaskan tentang praktik atau tindakan yang diambil terkait dengan keamanan migrasi. Pelaksanaan kebijakan demi keamanan migrasi tidak hanya mengandalkan hukum dan kebijakan saja sehingga praktik keamanan sangat penting dalam proses migrasi suatu negara. Dalam bukunya, Bourbeau kemudian membagi kategori ini menjadi dua indikator utama yakni *Interdiction Indicator* dan *Detention Indicator* (Bourbeau, 2011).

- *Interdiction Indicator* atau indikator pencegahan, bertujuan untuk menghentikan, mengalihkan serta mencegah arus migrasi yang ada demi keamanan negara tersebut.
- *Detention Indicator* atau indikator penahanan, bertujuan ketika terdapat tindakan berupa ancaman maupun pelanggaran yang dilakukan imigran

sehingga dapat dilakukan proses hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan (Bourbeau, 2011).

Teori ini berupaya untuk menggabungkan suatu sistem migrasi ke dalam suatu kerangka keamanan atau dengan kata lain bagaimana migrasi dapat menjadi bagian dari keamanan. Teori ini juga menjelaskan tentang keamanan migrasi suatu negara apabila dikendalikan dengan baik dan benar maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman serta pelanggaran yang mungkin saja datang dari para imigran (Bourbeau, 2011).

Lebih lanjut, terkait bagaimana perubahan kebijakan keimigrasian sebagai bentuk upaya sekuritisasi Amerika Serikat terhadap imigran akan dianalisis menggunakan teori *The Securitization of Migration* yang ditulis oleh Philippe Bourbeau dengan menggunakan 2 kategori dalam teori ini, yaitu kategori institusional dan kategori security practice. Kategori institusional akan digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan imigrasi yang dijalankan oleh Amerika Serikat yang berhubungan dengan birokrasi imigrasi yang kemudian membuat batasan-batasan untuk para imigran. Sedangkan kategori security practice akan digunakan untuk melihat dan menganalisis terkait penanganan permasalahan keimigrasian yang terjadi di Amerika Serikat khususnya pada kebijakan. Teori *Securitization of Migration* dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena penulis hendak melihat bagaimana sebuah kebijakan yang diambil oleh suatu negara demi keamanan negara yang berkaitan dengan upaya sekuritisasi migrasi. Untuk itu penulis juga akan berfokus pada Security Practice yang terdapat didalam teori *Securitization of Migration* Philippe Bourbeau untuk mengetahui seberapa efektif perubahan kebijakan migrasi yang diambil oleh Amerika Serikat dibawah

kepemimpinan presiden Donald Trump terkait kebijakan keimigrasian bagi para imigran, mengingat pada tahun 2017 hingga 2020 banyak terjadi tindakan yang berkaitan dengan perubahan keimigrasian di Amerika Serikat. (Bourbeau, 2011).

1.8. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, analisis bersifat induktif/kumulatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013, p. 2).

Metode penelitian kualitatif sendiri adalah sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah dari sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif juga merupakan sebuah penelitian riset yang sifatnya deskriptif dan lebih mengarah kepada analisis. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami secara mendalam terhadap suatu masalah secara detail pada suatu permasalahan yang sedang dikaji. Maka dari itu tentunya metode kualitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif.

Data yang sudah di dapat dari hasil pengamatan yang telah dilakukan secara analisis akan disusun oleh peneliti. Peneliti melakukan analisis data dengan cara memperbanyak informasi dari berbagai sumber dan kemudian informasi yang didapat akan dibandingkan guna untuk menemukan hasil atau data yang sesungguhnya. Metode penelitian kualitatif dirasa tepat untuk digunakan dalam

penelitian ini karena penelitian ini merupakan sebuah penelitian analisa yang berdasarkan teori dan kasus yang terjadi.

Beberapa alasan yang mendasari penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif adalah, pertama, karena dalam penelitian ini penulis hendak menghasilkan satu pemahaman mengenai bagaimana perubahan kebijakan imigrasi Amerika Serikat dan hubungannya dengan sekuritisasi negara. Kedua, penulis hendak membangun argumentasi kausal terkait bagaimana perubahan kebijakan keimigrasian Amerika Serikat dapat berpengaruh terhadap keamanan negara. Ketiga, yakni merujuk pada pembahasan mengenai pengaruh suatu kebijakan imigrasi negara adalah hal yang memerlukan analisis deskriptif yang mendalam sehingga penulis akhirnya memilih metode penelitian kualitatif.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang saya gunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah metode library research atau metode studi pustaka. Metode pengambilan data ini digunakan demi mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, analisa berita dan pemikiran para ahli. Sehingga data yang ditemukan dapat digunakan dan dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menjabarkan analisa penelitian.

2. Metode Analisis Data

Terdapat beberapa tahapan dari proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, Pertama, penulis mencatat hasil data yang ditemukan dalam proses penemuan data. Seluruh sejarah pengumpulan data diberi kode penulisan sehingga sumber datanya dapat ditelusuri. Tahap kedua yakni penulis mengumpulkan dan

pemilihan data-data yang sekiranya diperlukan dan selanjutnya akan diklasifikasikan demi kemudahan pengolahan data. Tahap ketiga ialah menghubungkan data-data yang ada dengan relasi penelitian yang penulis angkat, pada proses ini juga akan dilakukan analisis terhadap temuan data dan hipotesis penulis sebelumnya.

3. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I merupakan pengantar penelitian, terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, serta metode penelitian.

Pada Bab II akan membahas mengenai bagaimana dinamika perubahan kebijakan keimigrasian Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pada Bab III akan membahas bagaimana teori *The Securitization of Migration* dalam menjelaskan perubahan kebijakan keimigrasian Amerika Serikat sebagai bentuk upaya sekuritisasi pemerintah Amerika Serikat terhadap imigran tahun 2017-2020.

Bab IV akan berisikan mengenai kesimpulan dari Bab-Bab sebelumnya dan rekomendasi terkait penelitian selanjutnya.

BAB II

DINAMIKA KEIMIGRASIAN DAN KEBIJAKAN IMIGRASI DI AMERIKA SERIKAT

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai dinamika keimigrasian Amerika Serikat, pembentukan kebijakan imigrasi jenis-jenis imigran yang menempati Amerika Serikat dan lain sebagainya. Selanjutnya penulis juga akan menjabarkan kebijakan keimigrasian pada masa pemerintahan Donald Trump dan perubahan-perubahan apa saja yang diberlakukannya dalam upaya sekuritisasi imigrasi Amerika Serikat.

2.1 Evolusi Kebijakan dan Keimigrasian Amerika Serikat

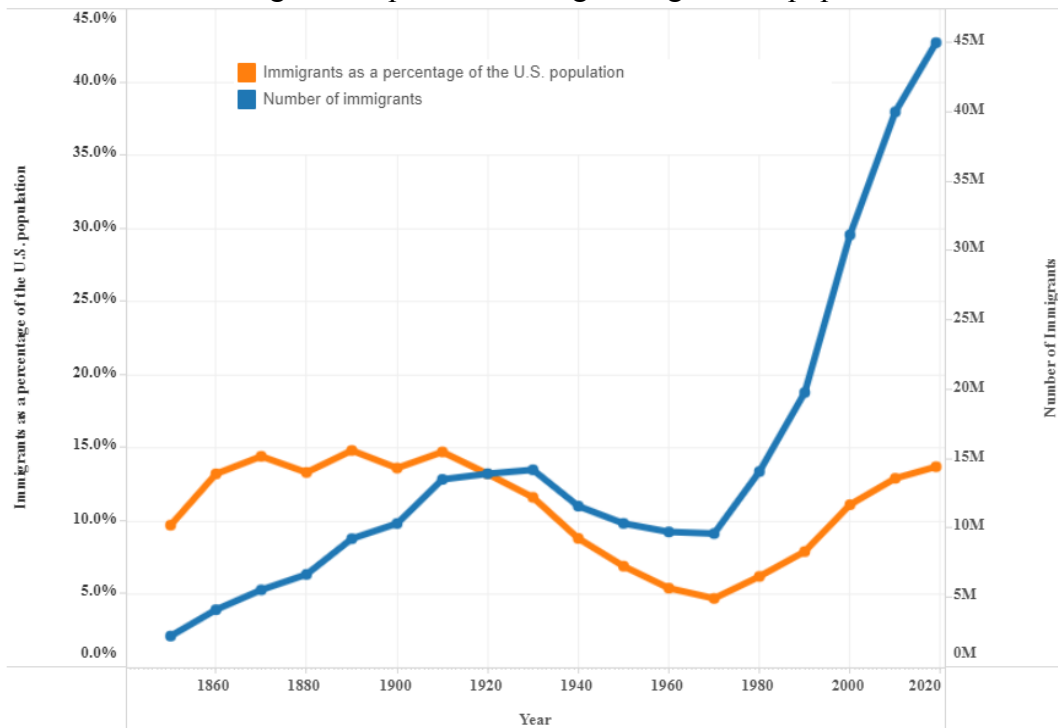
Menurut *United Nations Recommendations on Statistics of International Migration* tahun 1998, migran internasional didefinisikan sebagai setiap orang yang mengubah negara tempat tinggal biasanya. Beberapa faktor dapat menjelaskan pertumbuhan dalam fenomena migrasi internasional. Di satu sisi, populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah di negara maju menciptakan pasokan pekerjaan yang stabil dengan upah hingga lima kali lebih tinggi daripada di negara berkembang. Di sisi lain, turunnya biaya transportasi dan komunikasi, serta kehadiran jejaring sosial dan ketersediaan pekerja migran di seluruh negara tujuan, membantu memfasilitasi migrasi internasional. Selain itu, faktor politik dan ekonomi seringkali menjadi alasan utama di balik keputusan untuk bermigrasi.

Berdasarkan *World Migration Report 2018*, Amerika Serikat (AS) telah menjadi negara tujuan utama para migran internasional sejak tahun 1970. Hukum

federal pertama yang membatasi imigrasi secara kualitatif diberlakukan pada tahun 1875. Tahun berikutnya, Kongres mendirikan Layanan Imigrasi pada tahun 1891, dan menetapkan kebijakan imigrasi baru, yaitu UU Kuota pada tahun 1921 dengan sistem kuota asal nasional dengan reunifikasi keluarga sebagai tujuan fundamentalnya. Namun, tahun 1965 sistem kuota asal-nasional dihapuskan dan menetapkan sistem preferensi kategoris. Selanjutnya, terdapat UU Reformasi dan Kontrol Imigrasi tahun 1986 tentang masalah imigrasi tidak resmi dan UU Tanggung Jawab Imigran tahun 1996 tentang penegakan perbatasan dan penggunaan layanan sosial oleh imigran (The Congress of the United States & Congressional Budget Office, 2006).

Amerika Serikat adalah wilayah di mana imigrasi mendominasi dan secara absolut menjadi negara tujuan utama para migran di tingkat global dengan 36,7 juta orang kelahiran asing pada tahun 2009, mewakili 12% dari total populasi dan dengan arus masuk imigran lebih dari satu juta per tahun (sebagaimana diukur dengan izin tinggal permanen yang dikeluarkan). Diperkirakan 20,5 juta penduduk kelahiran asing berasal dari Amerika Latin dan Karibia dan lebih dari setengahnya lahir di Meksiko. Berikut adalah persentase imigran sebagai bagian dari populasi AS dan jumlah populasi imigran di AS.

Grafik 1. Jumlah imigran dan persentase imigran bagian dari populasi AS



Sumber: (Migration Policy Institute, 2019)

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 1970. Tetapi jumlah imigran saat ini secara proporsional lebih sedikit daripada tahun 1890, ketika penduduk kelahiran asing mencapai 15 persen dari populasi. Menurut Biro Sensus, saat ini imigran terdiri dari hampir 14 persen dari populasi AS, atau lebih dari 44 juta orang dari total sekitar 327 juta. Namun, apabila sensus dilakukan dengan menghitung imigran dan anak-anak mereka yang lahir di AS, maka persentase imigran sekitar 28 persen dari total penduduk AS. Terdapat dua kategori imigran di AS, diantaranya (Felter, Renwick, & Cheatham, 2020);

1. Imigran tidak berdokumen atau imigran tidak resmi, didefinisikan sebagai mereka yang bukan warga negara AS dan tidak memiliki izin tinggal yang sah;

2. Imigran resmi, didefinisikan sebagai mereka yang, mendapatkan izin tinggal dan bekerja di AS. Imigran ini biasanya disebut dengan pemegang *Green card* yang diakui secara hukum dan tercatat secara sah sebagai imigran.

Kebijakan imigrasi di AS mencerminkan berbagai tujuan; (1) untuk menyatukan kembali keluarga; (2) untuk menerima pekerja dengan keterampilan khusus; (3) untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi risiko penganiayaan politik, rasial, atau agama di negara asalnya; dan (4) untuk memastikan keragaman di AS (The Congress of the United States & Congressional Budget Office, 2006). Selain itu, AS menawarkan beberapa kategori penerimaan permanen dan sementara yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan tujuan yang luas tersebut, salah satunya adalah pemberian *green card*.

Kebijakan imigrasi AS telah mengalami perubahan besar sejak pelantikan Donald Trump pada Januari 2017. Dalam perubahan kebijakan yang dilakukannya, Trump membingkai imigrasi sebagai ancaman utama bagi keamanan bagi AS. Pendekatan yang diambil Trump terhadap kebijakan imigrasi berbeda dari para pendahulunya, baik dalam dampak negatif imigrasi dan pengaruhnya terhadap negara, dan tingkat perhatian yang ia berikan pada topik tersebut saat kampanye dan saat menjabat.

Sejak dilantik, Trump telah menandatangani delapan perintah eksekutif terkait imigrasi. Perintah ini menjanjikan perubahan besar pada sistem imigrasi, termasuk: membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan; mempekerjakan 15.000 petugas perbatasan dan penegakan interior tambahan; dan menghapus

”*sanctuary cities*”, yaitu kota yang menolak untuk bekerja sama secara proaktif dengan petugas penegakan imigrasi AS untuk menahan imigran tidak resmi.

Pada 27 Januari 2017, Presiden Trump mengeluarkan kebijakan imigrasi berdasarkan janji politiknya pada masa kampanye yang mana pada janji politik tersebut Trump menjelaskan tentang “*American First*”. Kebijakan tersebut dilakukan oleh Trump sebagai bentuk kebijakan populis nasionalistik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan AS dalam segala bentuk ancaman yang terjadi. Trump akan melakukan cara unilateralisme dengan bertindak secara sepihak demi kepentingannya untuk AS. Kebijakan yang terjadi ini merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap isu globalisasi serta kebijakan imigrasi yang telah dibentuk oleh konsensus elite politik sebelum Trump menjabat sebagai Presiden AS sehingga kesempatan warga AS untuk bekerja telah direbut oleh imigran yang masuk ke negara AS. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dalam publik AS.

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, banyak aksi penolakan yang dilakukan oleh publik di AS, mereka menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai bangsa yang sudah terkandung sejak lama. AS merupakan tanah kebebasan dan juga harapan bagi semua orang, sehingga kebijakan tersebut juga dianggap sebagai bentuk dari pengingkaran sejarah AS yang sudah lama dibangun oleh para imigran dan menjadikan AS sebagai negara yang tidak lagi mendukung aksi demokrasi dan juga tidak mendukung Hak Asasi Manusia.

Ada kebijakan tentang larangan masuk ke AS dari beberapa negara yang mayoritas muslim, diantaranya Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya. Dari beberapa negara tersebut Trump berpendapat bahwa hal itu dilakukannya untuk menjaga keamanan negara AS dalam mencegah aksi terorisme

dan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan tindakan dari diskriminasi terhadap umat muslim, namun untuk membatasi jumlah imigran yang masuk dan meminimalisir adanya kemungkinan ancaman dari migran-migran yang memanfaatkan fasilitas *green card* (Pujayanti, 2017).

Selain itu, untuk memenuhi janji kampanyenya, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk meningkatkan pemeriksaan yang akan fokus pada pencegahan masuknya orang yang dianggap mengancam keselamatan publik dan memastikan bahwa negara asing berbagi informasi dengan pejabat AS tentang warga negara mereka yang akan mengajukan permohonan untuk masuk ke AS. Sejalan dengan itu, dalam administrasi Trump secara signifikan mewajibkan pelamar imigrasi untuk melakukan wawancara sebelum disetujui untuk melakukan imigrasi atau perjalanan ke AS.

Atas perintah eksekutif Trump, Program Pengabaian Wawancara Visa pun ditangguhkan. Sehingga pelancong tertentu tidak lagi dapat memperbarui otorisasi perjalanan mereka tanpa wawancara pribadi. Dalam administrasi Trump juga mengamanatkan bahwa semua pelamar untuk *green card* wajib menghadiri wawancara langsung, yang mana sebelumnya wawancara tatap muka hanya diperlukan jika ada perhatian khusus terkait lamaran orang tersebut. Persyaratan yang meningkat ini dengan sangat cepat meningkatkan beban kerja juri visa imigran AS dan mengurangi kapasitas untuk sidang aplikasi imigrasi dan naturalisasi berbasis keluarga. Sehingga, terjadi penurunan adjudikasi untuk aplikasi imigrasi dari 22 persen pada tahun 2016 menjadi 9 persen pada tahun 2017 (Pierce, Bolter, & Selee, 2018).

Terdapat 8 perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Trump pada masa jabatannya, diantaranya (Federal Register, 2021);

1. Fokus pada keamanan perbatasan, menginstruksikan agen federal untuk membangun tembok untuk mendapatkan kendali operasional penuh dari perbatasan AS dengan Meksiko. Selain itu, Trump menyerukan untuk mengakhiri praktik “tangkap dan lepaskan”, di mana imigran tidak sah tertentu yang ditangkap di perbatasan akan diizinkan masuk ke Amerika Serikat sementara mereka menunggu sidang pengadilan;
2. Menegakan hukum dalam negeri dengan memperluas kategori imigran tidak resmi yang diprioritaskan untuk dideportasi dan memerintahkan peningkatan personel penegakan hukum. Kebijakan tersebut juga bergerak untuk membatasi dana federal yurisdiksi suaka, yang membatasi kerja sama mereka dengan pejabat imigrasi federal;
3. Pencegahan terorisme dengan melarang warga negara dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman memasuki AS setidaknya selama sembilan puluh hari; memblokir warga negara dari Suriah tanpa batas waktu; dan menanggukkan program pengungsi AS selama 120 hari. Tindakan ini menuai protes luas dan tantangan hukum dari individu, kota, dan negara bagian. Selanjutnya, pada awal 2020, Gedung Putih memperluas larangan dengan menanggukkan aplikasi visa dari Eritrea, Kyrgyzstan, Myanmar, dan Nigeria dan memblokir tempat tinggal permanen melalui *diversity program* untuk warga Sudan dan Tanzania;
4. Mengurangi batas tahunan pengungsi yang diterima di Amerika Serikat dari 110.000 menjadi 18.000, dan mempersulit pengungsi untuk mencari suaka.

Lebih dari 250.000 mengajukan suaka pada tahun 2017. Namun, pemerintahan Trump mengakhiri status perlindungan sementara (TPS) untuk puluhan ribu warga Haiti, Nikaragua, dan Sudan yang diizinkan untuk menetap dan bekerja di AS setelah bencana lingkungan dan konflik di negara asal mereka. Pada 2018, Trump melakukan hal yang sama terhadap warga Honduras, Nepal, dan Salvador;

5. Mengumumkan rencana untuk menghapus DACA yang dibentuk oleh Obama. Namun, Mahkamah Agung menolak rencana Trump karena alasan yang cukup untuk melakukannya;
6. Meningkatkan upaya pemerintah sebelumnya untuk mencegah penyeberangan perbatasan, termasuk oleh pengungsi. Pada awal 2018, Trump menerapkan kebijakan tanpa toleransi, di mana pihak berwenang menangkap dan menuntut semua orang yang tertangkap melintasi perbatasan selatan tanpa izin termasuk memisahkan orangtua dari anak-anak mereka;
7. Membendung masuknya migran Amerika Tengah melalui perjanjian "negara ketiga yang aman" dengan El Salvador, Guatemala, dan Honduras (disebut dengan *Northern Triangle*). Trump meluncurkan sebuah perjanjian yang disebut dengan *Asylum Cooperation Agreement* (ACA), yang merupakan perjanjian yang dibentuk untuk dapat menangani masalah imigrasi ilegal, yang didorong oleh lebih dari 71% migran yang ditangkap di perbatasan Barat Daya AS dari El Salvador, Guatemala, atau Honduras pada tahun 2019 (Homeland Security, 2020); dan

8. Memerintahkan CBP untuk menerapkan "pengukuran," atau menerima sejumlah pemohon suaka setiap hari dan menginstruksikan orang lain untuk tetap tinggal di Meksiko. Trump memperluas praktik ini pada tahun 2019 di bawah Protokol Perlindungan Migran, yang mewajibkan pencari suaka untuk tinggal di Meksiko sementara kasus mereka menunggu keputusan. Ia juga mengancam akan mengenakan tarif untuk menekan Meksiko untuk memperkuat penegakan perbatasannya.

Selain perintah eksekutif di atas, dengan tujuan melindungi pekerja AS, pemerintahan Trump juga telah mendorong USCIS untuk lebih diskriminatif dalam menyetujui aplikasi. Pada 18 April 2017, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif berjudul “*Buy American and Hire American*” di mana ia mendorong Departemen Luar Negeri, Kehakiman, Perburuhan, dan Keamanan Dalam Negeri untuk mengeluarkan aturan dan pedoman baru untuk melindungi kepentingan pekerja AS, dan untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan dalam sistem imigrasi (USCIS, 2017). Selanjutnya, pada Februari 2018, presiden mengeluarkan nota yang memerintahkan pembentukan *National Vetting Center*, yang akan merampingkan proses pemeriksaan imigrasi dengan menggabungkan data dan mengoordinasikan operasi lintas lembaga, sehingga pemohon pemukiman kembali pengungsi dari negara-negara yang dianggap “berisiko tinggi” harus tunduk pada langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat. Secara sederhananya, selama masa pemerintah Trump, ia telah mengambil sejumlah langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi pemberi kerja untuk membawa pekerja sementara ke negara tersebut, membuat prosesnya lebih lama dan meningkatkan jumlah aplikasi yang ditolak;

2. Meningkatkan dan memprioritaskan kunjungan ke tempat kerja untuk memastikan pekerja sementara dan pemberi kerja mematuhi undang-undang AS;
3. Meningkatkan persyaratan pembuktian bagi pengusaha untuk mengajukan petisi untuk kategori pekerja sementara tertentu;
4. Mengakhiri program era Obama yang memungkinkan DHS memberikan pembebasan bersyarat kepada pengusaha kelahiran asing untuk jangka waktu tertentu jika hal itu dinilai memiliki manfaat ekonomi bagi negara;
5. Mempercepat proses penolakan aplikasi untuk masuk atau tinggal di AS dengan menolak pemohon kesempatan untuk melengkapi bukti pendukung; dan
6. Mengarahkan pejabat imigrasi untuk menempatkan semua imigran yang permohonannya ditolak untuk alasan apa pun dalam proses pemindahan jika, atas penolakan, mereka hadir secara tidak sah di negara tersebut.

Pemerintah juga telah mengambil sejumlah langkah tambahan untuk mengurangi jumlah visa yang dikeluarkan. Ini termasuk pengumuman bahwa mereka berencana untuk membuat perubahan pada program H-1B, program visa sementara yang digunakan pemberi kerja untuk mendatangkan karyawan berketerampilan tinggi, dengan mendefinisikan kembali siapa dan jenis pekerjaan apa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan visa, dan dengan mengakhiri program H-4 yang memberikan izin kerja kepada pasangan tanggungan pemegang visa H-1B. Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mempersulit para imigran untuk mendapatkan *green card* atau memperpanjang visa mereka jika mereka atau tanggungan mereka memanfaatkan salah satu dari

rangkaian tunjangan publik dan kredit pajak yang diperluas yang menjadi hak mereka (Pierce, Bolter, & Selee, 2018).

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan kebijakan keimigrasian sebelum pemerintahan Trump dan pada masa jabatannya. Sebelum pemerintahannya kebijakan keimigrasian lebih ramah terhadap imigran dengan memberikan berbagai kemudahan bagi para imigran untuk mendapatkan visa. Namun, pada masa jabatan Trump, ia merubah berbagai kebijakan tersebut dengan mempersulit persyaratan pengaplikasian visa dan membuat beragam kebijakan baru yang menyulitkan imigran untuk memasuki AS, bahkan beberapa kebijakan tersebut sengaja dibuat untuk mengurangi jumlah imigran di AS.

Hal tersebut dilakukan Trump untuk melindungi warga AS dari potensi atau ancaman terorisme, dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada warga AS untuk mendapatkan pekerjaan, karena adanya anggapan bahwa imigran mendominasi lapangan pekerjaan di AS. Sehingga, pada bab selanjutnya penulis akan menjelaskan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan Trump merupakan upaya sekuritisasi imigrasi AS, yang akan dianalisa melalui teori *securitization of migration* oleh Bourbeau.

BAB III
***THE SECURITIZATION OF MIGRATION* DALAM PERUBAHAN**
KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN AMERIKA SERIKAT

Adanya perubahan kebijakan tentunya didorong oleh adanya masalah yang timbul yang diakibatkan oleh pemegang status LPRs. Setelah penulis menjabarkan perubahan kebijakan keimigrasian AS pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan menjelaskan bahwa perubahan kebijakan keimigrasian merupakan suatu upaya sekuritisasi imigrasi dengan menggunakan teori *the securitization of migration* oleh Bourbeau. Bab ini akan dibagi kedalam dua subbab, yaitu *Institutional Category* sebagai upaya sebagai upaya perubahan kebijakan, dan *Security Practice Category* sebagai bentuk implementasi dari upaya yang dilakukan Trump untuk menghindarkan AS dari berbagai bentuk ancaman yang ditimbulkan oleh imigran berstatus LPRs.

3.1. Institutional Category dalam Green Card Lottery sebagai Upaya Sekuritisasi Imigrasi Amerika Serikat

Dalam *Institutional Category*, Bourbeau menjelaskan bahwa konstitusi adalah seperangkat indikator yang menawarkan sekuritisasi migrasi secara berpasangan yang dilakukan dengan cara menghubungkan antara satu hal dengan hal lainnya yang memiliki kesamaan pada institusi pemerintahan. Kemudian kategori ini dikelompokkan lagi ke dalam tiga indikator antara lain; hukum sebagai indikator (Legal Indicator), kebijakan pemerintah sebagai indicator (Policy Statement Indicator), dan Saliency Indicator.

3.1.1 Legal Indicator

Menurut Bourbeau, setiap negara memiliki sistem hukum sendiri yang memiliki peran penting tanpa kecuali, seperti keimigrasian. Sehingga, *Legal Indicator* menjadi salah satu indikator yang penting dalam kategori institusional, mengingat bahwa hukum memiliki peranan yang penting dalam proses sekuritisasi migrasi. Terkait hal migrasi, setiap negara tentunya memiliki aturan hukum yang berlaku. Masing-masing meliputi tujuan, prosedur migrasi seorang imigran, dan juga upaya dalam menangani ancaman yang mungkin saja ditimbulkan oleh para imigran yang masuk ke negaranya, serta tindakan yang dilakukan oleh suatu negara apabila terjadi ancaman keamanan dari para imigran (Bourbeau, 2011, p. 19).

Konstitusi AS memberikan sangat sedikit perincian tentang bagaimana seharusnya kebijakan imigrasi AS, tetapi memberikan pedoman yang luas tentang siapa yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan tersebut, serta sarana hukum untuk tantangan terhadap elemen-elemen kebijakan itu. Dalam Pasal I, Bagian 8, Konstitusi AS memberi Kongres tanggung jawab untuk menetapkan aturan naturalisasi yang seragam, yang menentukan bagaimana imigran dapat menjadi warga negara AS. Namun, terlepas dari pasal tersebut, banyak negara bagian yang memberlakukan kebijakan imigrasi mereka sendiri selama tahun-tahun (Constitution Annotated, 2021).

Menurut profesor hukum Irvine Jennifer Chacon dari *University of California*, selama abad pertama keberadaan AS, banyak negara bagian memberlakukan undang-undang yang mengatur dan mengendalikan imigrasi ke perbatasan mereka sendiri. Berbagai negara bagian mengesahkan undang-undang yang bertujuan mencegah berbagai populasi memasuki perbatasan negara bagian,

termasuk individu dengan catatan kriminal, orang yang bergantung pada bantuan publik, budak, dan orang kulit hitam merdeka (Chacón, 2009). Namun, sejak akhir abad ke-19, Mahkamah Agung AS secara konsisten mendukung peraturan imigrasi federal terhadap tantangan konstitusional.

Berdasarkan konstitusi AS, INA mengizinkan AS untuk memberikan hingga 675.000 visa imigran permanen atau *green card* setiap tahun di berbagai kategori visa. Dalam 675.000 visa tersebut, INA tidak membatasi penerimaan tahunan pasangan warga negara AS, orang tua, dan anak-anak di bawah usia 21 tahun. Selain itu, setiap tahun presiden diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Kongres dan menetapkan jumlah tahunan pengungsi yang akan diterima di AS melalui Proses Pemukiman Kembali Pengungsi AS. Begitu seseorang mendapatkan visa imigran atau mendapatkan *green card*, mereka menjadi penduduk tetap yang sah (LPR). LPR adalah warga negara asing yang diizinkan untuk bekerja, tinggal secara sah dan permanen di AS. Setelah tinggal di AS selama lima tahun (atau tiga tahun dalam beberapa keadaan), LPR memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan AS (Appleby, 2020).

Selain menetapkan persyaratan dan prosedur pengajuan *green card* hukum yang berlaku di AS juga mengatur bagaimana seorang pemegang *green card* dapat dideportasi dari AS ke negara asal mereka. Hal tersebut diatur dalam INA Section 237, yang menyebutkan bahwa, meskipun orang yang membawa visa non-imigran atau *green card* memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di AS dalam jangka panjang, hak-hak ini sepenuhnya bergantung pada mengikut aturan tertentu dan menghindari jenis pelanggaran hukum tertentu. Hanya imigran yang berhasil menjadi warga negara AS yang aman dari deportasi dan kewarganegaraan tersebut

tidak dapat dihapuskan, kecuali terdapat indikasi penipuan untuk mendapatkan *green card* atau kewarganegaraan mereka (The United States Code, 2021).

Sehingga, berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan INA merupakan wujud implementasi dari *legal indicator*, yaitu suatu aturan atau hukum yang memiliki sistem, prosedur dan upaya untuk dapat mewujudkan sekuritisasi imigrasi (Bourbeau, 2011, p. 19). Dalam hal ini, *legal indicator* tersebut terwujud melalui INA di mana INA merupakan perundangan yang mengatur keimigrasian AS dan akan diimplementasikan oleh lembaga lain. Meskipun pembentukan INA sendiri sudah dilakukan sebelum masa pemerintahan Trump, hal tersebut menunjukkan bahwasanya AS sudah mengatur sekuritisasi imigrasi dan terus melakukan berbagai perubahan terhadap perundangan tersebut dengan mengikuti arus globalisasi dan isu keamanan sebagaimana yang dilakukan oleh Trump.

3.1.2 Policy Statements Indicator

Policy Statement Indicator adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait proses migrasi yang berhubungan dengan keamanan suatu negara. Adanya perubahan atau pengeluarakan kebijakan dipengaruhi oleh adanya aktivitas migrasi yang cenderung menimbulkan permasalahan dan ancaman bagi negara. Permasalahan tersebut dapat berupa migrasi ilegal atau kejahatan transnasional. Menurut Bourbeau, untuk dapat membantu kelancaran upaya sekuritisasi migrasi maka diperlukan sebuah elemen atau lembaga yang fokus terhadap permasalahan keamanan dalam migrasi (Bourbeau, 2011, p. 21).

Dalam upaya sekuritisasi imigrasi AS, terdapat beberapa lembaga yang terlibat, diantaranya *Department of Homeland Security (DHS)*, yang terbagi atas tiga fungsi yaitu USCIS, ICE, dan CBP. Dalam pelaksanaannya, DHS berperan dalam mengimplementasikan kebijakan keimigrasian AS dan setiap perubahan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Trump. Selain itu, DHS juga berperan sebagai lembaga yang mengimplementasikan INA, apabila imigran yang melanggar kebijakan keimigrasian AS atau melakukan kejahatan (Center for Migration Studies, 2020).

Selama masa Pemerintahannya, Trump dengan bantuan DHS, telah mengambil tindakan dalam kebijakan imigrasi untuk menguntungkan dan melindungi rakyat AS, seperti; mengamankan perbatasan, memperkuat kebijakan imigrasi, menegakkan hukum dalam negeri, melawan eksploitasi asing, dan bekerja sama dengan mitra internasional. Sebagai bentuk dari *policy statement indicator*, DHS memainkan peran penting dalam penegakan kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satu contohnya adalah, DHS memiliki hak untuk mendeportasi imigran yang memperoleh *green card*, apabila terbukti melanggar hukum dan melakukan kejahatan, dan dilarang memasuki kembali AS selama beberapa tahun.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan DHS merupakan bentuk implementasi *policy statement indicator*, yaitu suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempermudah upaya sekuritisasi imigrasi dengan membentuk suatu lembaga yang mengimplementasikan sistem, hukum dan aturan imigrasi yang telah diciptakan (Bourbeau, 2011, p. 21). Dalam hal ini, pembentukan DHS merupakan perwujudan dari *policy statement indicator*, dimana hal tersebut menunjukkan bahwasanya membentuk INA sebagai perundangan

keimigrasian yang berlaku, tidaklah cukup tanpa adanya lembaga yang mengimplementasikan perundangan tersebut. Sehingga, dengan membentuk DHS diharapkan dapat mengatur arus masuknya imigran dan menentukan imigran yang berhak untuk tinggal dan mendapatkan *green card* dari AS.

3.1.3 Saliency Indicator

Saliency Indicator, berkaitan antara migrasi dan keamanan serta seberapa kuat hubungan antara kedua hal tersebut. *Saliency* yang dimaksud ialah seberapa kuat hubungan antara migrasi dan keamanan di dalam kebijakan suatu negara, misalnya ketika permasalahan terkait migrasi menjadi masalah prioritas dalam kebijakan (Bourbeau, 2011, p. 29). Imigrasi telah menjadi debat politik AS selama beberapa dekade, karena menyangkut masalah ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan. Kongres tidak dapat mencapai kesepakatan tentang reformasi imigrasi yang komprehensif selama bertahun-tahun, dan secara efektif memindahkan beberapa keputusan kebijakan utama ke dalam cabang eksekutif dan yudikatif pemerintah dan memicu perdebatan di aula pemerintah negara bagian. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya permasalahan imigrasi menjadi salah satu prioritas bagi AS. Menurut Bourbeau, apabila permasalahan imigrasi menjadi prioritas bagi suatu negara, maka dibutuhkan kerjasama dengan organisasi atau negara lain, sehingga permasalahan imigrasi dapat diselesaikan.

Salah satu bentuk kerjasama yang pernah dibentuk Trump pada masa pemerintahannya adalah pembentukan ACA yang melibatkan DHS, Guatemala, El Salvador dan Honduras. DHS mengatur ACA dengan masing-masing negara untuk memperluas kemampuan suaka dan meningkatkan keselamatan, keamanan, dan

kemakmuran di seluruh wilayah. Dengan ACA, AS berkomitmen untuk menjadi mitra yang baik bagi tetangganya di Amerika Tengah dan akan bekerja untuk mengembangkan wilayah yang dinamis secara ekonomi. Bersama-sama, DHS dan mitranya mengembangkan wilayah yang lebih aman dan lebih makmur sehingga orang Amerika Tengah dapat merasa percaya diri dalam menciptakan masa depan di negara asalnya, daripada menyerahkan hidup mereka ke tangan penyelundup dan organisasi kriminal untuk melakukan perjalanan berbahaya melintasi perbatasan AS (Department of Homeland Security, 2019).

Selain ACA, terdapat beberapa perjanjian lain yang disepakati oleh pihak-pihak tersebut di atas, di antaranya:

1. *Border Security Agreement*, yaitu perjanjian yang bekerjasama dengan CBP dan ICE untuk membina dan membimbing satuan kepolisian negara tuan rumah, keamanan perbatasan, imigrasi dan petugas bea cukai; dan
2. *Biometric Data Sharing Program (BDSP) Agreement*, yaitu perjanjian yang bekerjasama dengan DHS dan negara *Northern Triangle*, untuk membagikan data biometrik calon imigran agar dapat mendeteksi dan memverifikasi aktitas yang dapat menimbulkan ancaman seperti kejahatan transnasional atau penyeludupan (Department of Homeland Security, 2019).

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa, dibentuknya ACA menunjukkan maraknya kasus migran ilegal di AS sehingga AS membutuhkan koordinasi dari negara-negara tetangganya. Pembentukan kerjasama tersebut merupakan wujud implementasi *saliency indicator*, yaitu suatu kondisi di mana

permasalahan keimigrasian merupakan suatu prioritas Negara, sehingga penting untuk melakukan kerjasama dengan Negara lain (Bourbeau, 2011, p. 29). Dalam hal ini, *saliency indicator* terwujud dalam pembentukan kerja sama yang telah disebutkan di atas. Dengan pembentukan kerjasama tersebut, diharapkan dapat mengatur arus masuk dan menurunkan jumlah imigran ilegal di AS.

3.2 *Security Practice Category* dalam Praktik Sekuritisasi Imigrasi

Security Practice Category merupakan praktik atau tindakan yang diambil terkait dengan keamanan migrasi. Pelaksanaan kebijakan demi keamanan migrasi tidak hanya mengandalkan hukum dan kebijakan saja sehingga praktik keamanan sangat penting dalam proses migrasi suatu negara. Dalam bukunya, Bourbeau kemudian membagi kategori ini menjadi dua indikator utama yakni *Interdiction Indicator* dan *Detention Indicator*. Dalam subjudul ini, penulis akan menjabarkan praktik sekuritisasi imigrasi, dan bagaimana implementasinya di AS pada masa pemerintahan Trump.

3.2.1 *Interdiction Indicator*

Interdiction Indicator atau indikator pencegahan yang bertujuan untuk menghentikan, mengalihkan serta mencegah arus migrasi yang ada demi keamanan negara tersebut. Indikator pencegahan dapat berupa perubahan kebijakan dan atau pembuatan kebijakan baru, pengetatan persyaratan imigrasi dan lain sebagainya (Bourbeau, 2011, p. 20). Dalam administrasi Trump, pembuatan kebijakan merupakan suatu praktik dari upaya sekuritisasi imigrasi AS.

Dalam hukum yang berlaku di Amerika Serikat, sebagai Kepala Eksekutif dan direktur administrasi, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan instruksi dan perintah (*executive order*) untuk mengawasi dan mengarahkan berbagai aspek cabang eksekutif, yang diatur dalam Pasal II Konstitusi (Cash, 1963). Selain itu, konstitusi juga menuntut Presiden untuk menggunakan haknya dengan tanggung jawab dan untuk tidak mengeluarkan *executive order* yang bertentangan dengan undang-undang agar tidak dibatalkan. Selama pemerintahan Trump sejak tahun 2017-2021, ia mengeluarkan setidaknya 219 *executive order* (Federal Register, 2021).

Presiden Trump sudah dikenal sebagai Presiden yang eksentrik dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Salah satu *executive order* yang dikeluarkan oleh Trump dan mendapat kecaman, baik dari masyarakat Amerika Serikat maupun masyarakat internasional adalah *Executive Orders* 13769 tentang *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*. Secara garis besar, *executive order* tersebut dikeluarkan karena kekhawatiran Trump akan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh para imigran, seperti ancaman terorisme.

Presiden Trump telah menandatangani beberapa perintah eksekutif yang mempengaruhi kebijakan imigrasi. Salah satunya adalah penghentian penerbitan *green card* kepada imigran tertentu, dengan alasan bahwa pekerja asing tidak boleh bersaing dengan warga negara AS. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada 22 April 2020, dan berlaku selama 60 hari mulai 23 April 2020. Kebijakan tersebut tidak termasuk kategori pemohon *green card* tertentu, seperti investor, tenaga medis profesional (dokter, dan perawat), anggota militer AS dan keluarga dekat mereka. Meskipun mengutip alasan ekonomi untuk penghentian tersebut, studi

menunjukkan bahwa imigran secara keseluruhan berkontribusi pada kesehatan ekonomi AS dan bukan bersaing dengan pekerja AS.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang diterbitkan Trump pada beberapa kebijakan keimigrasian AS adalah bentuk dari *interdiction indicator*, yaitu suatu tindakan pencegahan yang diwujudkan dalam membuat kebijakan baru atau merubah kebijakan yang sudah ada (Bourbeau, 2011, p. 20). Dalam hal ini, *interdiction indicator* terwujud dalam perubahan kebijakan dan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Trump, dimana tujuan perubahan dilakukan atas dasar pengetatan keamanan AS dan pencegahan dari potensi terorisme. Trump sebagai Presiden AS tentunya memiliki wewenang tersebut. Sehingga, meskipun perubahan kebijakan yang dilakukannya mendapat kecaman dari dunia internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya tersebut dilakukannya demi melindungi warga negaranya sendiri yang merupakan kewajibannya sebagai kepala negara.

3.2.2 Detention Indicator

Detention Indicator atau indikator penahanan, bertujuan ketika terdapat tindakan berupa ancaman maupun pelanggaran yang dilakukan imigran sehingga dapat dilakukan proses hukum guna memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan (Bourbeau, 2011, p. 20). Meskipun DHS telah melakukan pengetatan pemilihan pemegang *green card*, tidak menutup kemungkinan bahwa pemegang kartu tersebut dapat melakukan kejahatan di AS. Salah satu contohnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh Sayfullo Saipov.

Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2017, Sayfullo Habibullaevich Saipov mengendarai truk pickup sewaan, dan menabrakkannya ke

pengendara sepeda dan pelari sekitar satu mil (1,6 kilometer) dari jalur sepeda Taman Sungai Hudson di sepanjang West Street dari Houston Street selatan ke Chambers Street di Lower Manhattan, New York City, dan menewaskan delapan orang, enam di antaranya adalah turis asing, dan melukai setidaknya sebelas orang lainnya. Setelah itu ia menabrakkan truk ke bus sekolah dan keluar dari pickup dengan membawa dua senjata (kemudian diidentifikasi sebagai pistol *paintball* dan pistol pelet). Dia ditembak di bagian perut oleh seorang polisi dan ditangkap. Di dalam pickup tersebut, ditemukan sebuah bendera dan dokumen yang menunjukkan kesetiannya kepada kelompok teroris *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL).

Dewan juri federal mendakwa Saipov yang berusia 29 tahun, yang merupakan pemegang *green card* dari Uzbekistan dan sudah tinggal di AS sejak tahun 2010, dengan dakwaan delapan pembunuhan, dua belas percobaan pembunuhan, penghancuran kendaraan bermotor dan penyediaan materi dukungan untuk organisasi teroris. Pada 17 Januari 2018, dalam sebuah surat kepada Hakim Vernon Broderick, pembela mengatakan Saipov mengaku bersalah atas semua dakwaan dan akan menjalani hukuman penjara seumur hidup jika opsi hukuman mati tidak tersedia (Reuters, 2020). Hingga saat ini, Saipov masih melanjutkan persidangan hingga 9 April 2021 dan ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan di Manhattan, New York dengan BOP # 79715-054 (Judicial Case Law, 2021). Dalam merespon hal tersebut, Presiden Donald Trump memerintahkan DHS untuk meningkatkan *Extreme Vetting Program* (Guild, 2017).

Sebagaimana disebutkan dalam subjudul *legal indicator* bahwa pemegang *green card* tetap dapat dideportasi, salah satu contoh kasusnya adalah Martello Barton, imigran asal Jamaica yang sudah tinggal di AS sejak tahun 1989 dan

mendapatkan *green card* pada tahun 1992. Pendeportasian Barton berawal dari pengetatan kebijakan imigrasi oleh Trump, dimana ia dapat dideportasi atas kejahatan yang dilakukannya pada tahun 1996 karena penyerangan dan kepemilikan senjata api, serta kepemilikan narkoba pada 2007 dan 2008. Atas dakwaan tersebut, Barton mengajukan pembatalan ke pengadilan, namun ditolak.

Berdasarkan konstitusi AS, pengadilan dapat membatalkan penarikan *green card*) apabila telah tinggal di AS secara terus menerus selama 7 tahun. Namun, terdapat “*stop-time rule*” yang menghentikan waktu tempat tinggal berkelanjutan ketika individu melakukan kejahatan, sehingga individu tersebut “tidak dapat diterima” di AS atau “dapat dipindahkan” dari AS. Pemerintah berargumen bahwa Barton tidak memperoleh tujuh tahun tinggal terus menerus sejak dia masuk ke AS pada tahun 1989 karena kejahatannya pada tahun 1996 memicu *stop-time rule* (Oyez, 2020).

Pendeportasian Barton tersebut memungkinkan beberapa pemegang *green card* juga akan dideportasi dari AS dengan dakwaan kasus lama dan kejahatan ringan. Meskipun begitu, Trump mengatakan bahwa pemegang *green card* yang dipilih untuk deportasi dapat mengajukan permohonan agar pendeportasian mereka dibatalkan jika mereka telah tinggal terus menerus di AS setidaknya selama tujuh tahun, kecuali jika mereka telah melakukan tindak pidana berat tertentu. Kedua contoh kasus di atas merupakan bentuk dari *detention indicator*, yaitu proses hukum yang diberikan kepada individu sebagai bentuk sanksi agar mendapatkan efek jera dari kejahatan yang diperbuatnya (Bourbeau, 2011, p. 20). Dalam hal ini, kedua contoh kasus di atas merupakan bentuk dari *detention indicator*. Hal tersebut dilakukan oleh Trump dengan alasan untuk melindungi warga AS dari kejahatan

yang dilakukan oleh imigran. Tindakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi seluruh imigran bahwasanya meskipun mereka sudah mendapatkan *green card*, mereka tidak lepas dari upaya deportasi apabila melakukan kejahatan di AS.

Sebagaimana dijelaskan oleh Phillippe Bourbeau, bahwa teori sekuritisasi memberikan gambaran pergerakan seseorang yang melewati batas suatu negara dan juga merupakan sebuah sistem tatanan yang akan mendasari setiap pergerakan orang tersebut (Bourbeau, 2011, p. 1). Kemudian Bourbeau membagi teori Sekuritisasi tersebut menjadi dua kategori yakni *Institutional Category* dan *Security Practice Category* yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi tiga dan dua indikator lain, yang akhirnya dapat menciptakan situasi keimigrasian yang aman. Dalam perubahan kebijakan keimigrasian yang dilakukan oleh Presiden Trump, memenuhi kedua kategori dan kelima indikator yang disebutkan di atas. Di mana dalam pengimplementasiannya, terdapat hukum yang mengatur keimigrasian AS, lembaga yang mengatur, kerjasama dengan negara lain, perubahan kebijakan sebagai tindakan pencegahan dan pengamanan, dan adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum. Dengan kata lain, perubahan kebijakan keimigrasian pada masa pemerintahan Presiden Trump merupakan suatu upaya sekuritisasi imigrasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Amerika Serikat merupakan negara multikultural semenjak memberlakukan kebijakan *Open Door* dengan mengizinkan imigran memasuki dan menetap di AS. *Green Card Lottery* adalah salah satu program yang dicanangkan oleh AS pada tahun 1996 yang memberikan kesempatan bagi siapa saja yang berasal dari luar AS untuk dapat tinggal dan bekerja di Amerika Serikat dengan status penduduk tetap yang sah (LPRs). Namun, pada masa pemerintahan Trump, ia mengubah kebijakan keimigrasian termasuk pemberian *green card*. Trump juga menghapus beberapa regulasi yang “ramah” akan imigran, sehingga imigran sulit memasuki Amerika Serikat.

Perubahan kebijakan terkait keimigrasian juga disusul dengan pelarangan masuknya imigran dari wilayah Timur, seperti Iran Irak, Suriah dan lain-lain. Hal tersebut, menimbulkan banyak perdebatan termasuk opini yang menyatakan bahwa kebijakna yang diambil Trump tersebut mendiskriminasi umat muslim. Terkait hal tersebut penting untuk mengetahui alasan dibalik perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Trump pada masa pemerintahannya tahun 2017-2020.

Untuk dapat menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan konsep sekuritisasi imigrasi yang dikeluarkan oleh Phillipe Bourbeau. Dalam konsepnya, ia membagi sekuritisasi imigrasi kedalam 2 kategori, yaitu:

- 1) *institutional category*, yang menjelaskan bahwa salah satu upaya sekuritisasi imigrasi adalah melalui konstitusi dengan menghubungkan antara satu hal dengan hal lainnya yang memiliki kesamaan pada institusi pemerintahan.

Kategori ini terbagi dalam 3 bentuk; (a) *legal indicator* (hukum, aturan dan prosedur); (b) *policy statement indicator* (lembaga implementasi hukum); dan (c) *saliency indicator* (kerjasama dengan negara lain);

- 2) *security practice category*, yang menjelaskan praktik dari tindakan pencegahan sebagai upaya sekuritisasi imigrasi. Kategori ini terbagi dalam 2 indikator yaitu; (a) *interdiction indicator* (perubahan kebijakan atau pembuatan kebijakan baru); dan (b) *detention indicator* (pemberian hukuman sebagai efek jera)

Dengan adanya masalah yang ditimbulkan imigran di AS, terutama mereka yang mendapatkan status LPRs, maka dengan menggunakan konsep di atas penulis menemukan bahwa perubahan kebijakan keimigrasian merupakan suatu upaya sekuritisasi yang dilakukan Trump untuk dapat melindungi negaranya. Hal tersebut dapat dibukti dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Menggunakan *The Securitization of Migration*

Kategori	Penjelasan dan Indikator menurut Bourbeau	Hasil Analisis perubahan Kebijakan Keimigrasian pada Masa Trump
<i>Institutional Category</i>	<i>Legal Indicator</i> (hukum, aturan dan prosedur sekuritisasi imigrasi)	- Terdapat INA yang merupakan hukum yang mengatur kebijakan imigrasi AS yang tertuang dalam USC. INA memuat banyak peraturan dan menata ulang struktur undang-undang keimigrasian.
	<i>Policy Statement indicator</i> (adanya lembaga yang mengimplementasikan hukum dan aturan)	- Adanya DHS yang merupakan departemen eksekutif federal AS yang bertanggung jawab atas keamanan publik, yang sebanding

	keimigrasian yang telah berlaku)	dengan Kementerian Dalam Negeri. DHS terbagi atas 3 fungsi: <i>U.S. Citizenship and Immigration Services</i> (USCIS), <i>U.S. Immigration and Customs Enforcement</i> (ICE), dan <i>U.S. Customs and Border Protection</i> (CBP).
	<i>Saliency indicator</i> (kerjasama yang dibentuk dengan Negara lain)	- <i>Asylum Cooperation Agreement</i> (ACA), yang merupakan perjanjian yang dibentuk untuk dapat menangani masalah imigrasi ilegal, yang dibentuk dengan El Salvador, Guatemala, atau Honduras
<i>Security Practice Category</i>	<i>Interdiction Indicator</i> (perubahan kebijakan atau pembuatan kebijakan baru sebagai bentuk pencegahan)	- Terdapat 8 perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Donald Trump, dimana perintah-perintah tersebut berupa merubah kebijakan-kebijakan yang “ramah” imigran, menjadi kebijakan-kebijakan yang mempersulit imigran untuk memasuki AS
	<i>Detention Indicator</i> (pemberian sanksi kepada imigran untuk memberikan efek jera)	- Imigran berstatus LPRs dapat dideportasi apabila terbukti melakukan kejahatan di AS, seperti Barton dan Saipov

Diolah dari Bourbeau (2011, pp. 20-30)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat imigran berstatus LPRs yang terbukti melakukan kejahatan di AS sehingga keberadaan mereka dapat menimbulkan ancaman bagi AS. Sehingga, dengan mengikuti konsep sekuritisasi imigrasi Bourbeau dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan

keimigrasian AS yang dilakukan oleh Trump pada masa pemerintahannya tahun 2017-2020, dalam hal ini adalah perubahan dalam kebijakan keimigrasian dan kebijakan-kebijakan lainnya, merupakan suatu upaya sekuritisasi imigrasi untuk dapat melindungi AS.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan kebijakan keimigrasian Amerika Serikat merupakan upaya yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump untuk mengamankan keimigrasian AS. Namun, skripsi ini hanya terbatas pada pembahasan perubahan kebijakan keimigrasian sehingga penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan yang dilakukan terkait penurunan jumlah imigran dan penurunan kasus imigran bermasalah pada masa Pemerintahan Donald Trump untuk membuktikan bahwa upaya yang dilakukannya berhasil dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Appleby, K. (2020, April 23). *President Trump Issues Executive Order Temporarily Halting the Issuance of Green Cards*. Retrieved May 9, 2021, from Center for Migration Studies: <https://cmsny.org/president-trump-covid-executive-order/>
- Batalova, J., Hanna, M., & Levesque, C. (2021, February 11). *Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States*. Retrieved April 28, 2021, from Migration Information Source: <https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states-2020>
- Bourbeau, P. (2011). *The Securitization of Migration: A Study of Movement and Order*. New York: Routledge.
- Chacón, J. M. (2009). Managing Migration through Crime. *Coloumbia Law Review Vol. 109*, 135-148.
- Cash, Robert B. (1963). Presidential Power: Use and Enforcement of Executive Orders. *Notre Dame Law Review Vol. 39 Issue 1*, 44-55.
- Center for Migration Studies. (2020, April 22). *President Trump's Executive Orders on Immigration and Refuges*. Retrieved June 18, 2021, from CMS: <https://cmsny.org/trumps-executive-orders-immigration-refugees/>
- Constitution Annotated. (2021). *ArtI.S8.C18.4.2 Implied Power of Congress Over Immigration*. Retrieved June 16, 2021, from Constitution Annotated: Analysis and Interpretation of The US Constitution: https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI_S8_C18_4_2/

Department of Homeland Security. (2019). *Fact Sheet: DHS Agreements with Guatemala, Honduras and El Salvador*. New York: Department of Homeland Security.

Executive Orders. (2021, 04 23). Retrieved from Federal Register: <https://www.federalregister.gov/presidential-documents/executive-orders>

Federal Register. (2021). *2021 Donald Trump Executive Orders*. Retrieved June 16, 2021, from National Archive: Federal Register: <https://www.federalregister.gov/presidential-documents/executive-orders/donald-trump/2021>

Felter, C., Renwick, D., & Cheatham, A. (2020, June 23). *The US Immigration Debate*. Retrieved April 29, 2021, from Council Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounders/us-immigration-debate-0>

Guild, B. (2017, November 1). *What is extreme vetting? White House outlines proposed immigration policy*. Retrieved May 14, 2021, from CBS News: <https://www.cbsnews.com/news/what-is-extreme-vetting/>

Hay, J. (1899). *First Open Door Note*. Washington: Department of State.

Homeland Security. (2020, December 29). *DHS Announces Guatemala, El Salvador, and Honduras Have Signed Asylum Cooperation Agreement*. Retrieved May 12, 2021, from Homeland Security: <https://www.dhs.gov/news/2020/12/29/dhs-announces-guatemala-el-salvador-and-honduras-have-signed-asylum-cooperation>

Judicial Case Law. (2021, April 9). *Document 370*. Retrieved May 14, 2021, from Judicial Case Law: https://judicialcaselaw.com/courts/nysd/cases/1_17-cr-00722-VSB/127128689894

- Kenton, W. (2020, 06 08). *Green Card*. Retrieved from Investopedia:
<https://www.investopedia.com/terms/g/green-card.asp>
- Law, A. O. (2002). The Diversity Visa Lottery: A Cycle of Unintended Consequences in United States Immigration Policy. *Journal of American Ethnic History*, 1-5.
- McNail, T. (2019, November 21). *Why the United States Is The Only Superpower*. Retrieved from TuftsNow: <https://now.tufts.edu/articles/why-united-states-only-superpower>
- Migration Policy Institute. (2019). *U.S. Immigrant Population and Share over Time, 1850-Present*. Retrieved April 28, 2021, from Migration Policy Institute: <https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/immigrant-population-over-time?width=1000&height=850&iframe=true>
- Morse, A. (2018, 10 15). *Common Immigration Terms*. Retrieved from NCSL: <https://www.ncsl.org/research/immigration/common-immigration-terms.aspx>
- Mossad, N. (2016). *U.S Lawful Permanent Residents*. U.S Department of Homeland Security Office of Immigration Statistics.
- Morawetz, N., & Fernández-Silber, N. (2014). Immigration Law and the Myth of Comprehensive Registration . *University of California Press Vol. 48:141* , 141-205.
- OECD. (2011). *International Migration in the Americas: First Report of the Continuous Reporting System on International Migration in the Americas (SICREMI) 2011*. Washington: Ultradesigns, Inc.

- Oyez. (2020, April 23). *Barton v. Barr*. Retrieved May 15, 2021, from Oyez:
<https://www.oyez.org/cases/2019/18-725>
- Pujayanti, A. (2017). Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump. *Info Singkat Vol. IX, No. 03/I/Puslit/Februari/2017*, 5-8.
- Pierce, S., Bolter, J., & Selee, A. (2018). *U.S. Immigration Policy under Trump: Deep Changes and Lasting Impacts*. Washington, DC: Migration Policy Institute.
- Reuters. (2020, February 19). *US Says Accused Bike-Path Killer Saipov Threatened to Behead Jail Officer*. Retrieved May 14, 2021, from VOA News:
<https://www.voanews.com/usa/us-says-accused-bike-path-killer-saipov-threatened-behead-jail-officer>
- The Congress of the United States & Congressional Budget Office. (2006). *Immigration Policy in the United States*. The Congress of the United States & Congressional Budget Office.
- The London News Journal*. (2020, October 8). Retrieved from The 2020 Green Card Lottery Is Open For Submissions From The 7th Of October 2020:
<https://thelondonnewsjournal.com/travel/the-2020-green-card-lottery-is-open-for-submissions-from-the-7th-of-october-2020/>
- The United States Code. (2021, May 9). *8 USC 1227: Deportable aliens*. Retrieved May 14, 2021, from The United States Code:
<https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title8-section1227&num=0&edition=prelim>
- The U.S. Economy: Historical Overview*. (2020, 08 11). Retrieved from The American Economy:

<https://www.encyclopedia.com/economics/economics-magazines/us-economy-historical-overview>

The White House. (2014, November 20). *FACT SHEET: Immigration Accountability Executive Action*. Retrieved May 1, 2021, from The White House: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/20/fact-sheet-immigration-accountability-executive-action>

Thomas, B. I. (2012). The U.S. Diversity Visa Programme and the Transfer of Skills from America. *U.S National Library of Medicine*, 1-3.

<https://id.rbth.com/sejarah/81484-seberapa-kuat-pakta-warsawa-wyx>

<https://www.uscitizenship.info/blog/immigrants-deserve-to-be-u-s-citizens/>

UNICEF. (2006). *Migration and Children*. Public Policy Issues.

US Citizenship and Immigration Services. (2019, July 10). *Immigration and Nationality Act*. Retrieved June 17, 2021, from US Citizenship and Immigration Services: <https://www.uscis.gov/laws-and-policy/legislation/immigration-and-nationality-act>

USCIS. (2017, April 18). *Buy American and Hire American: Putting American Workers First*. Retrieved June 16, 2021, from US Citizenship and Immigration Services: <https://www.uscis.gov/archive/buy-american-and-hire-american-putting-american-workers-first>

Zappile, T. (2014). Department of Homeland Security (DHS). *Encyclopedia of U.S. Intelligence*, 1-10.